



## ETIKA ADMINISTRASI DAN TATA KELOLA PENDIDIKAN YANG AKUNTABEL

Rameyza Elya Balqis<sup>1</sup>, Haris Riadi<sup>2</sup>, Umi Wulandari<sup>3</sup>  
<sup>1,2,3</sup> IAIN Datuk Laksemama Bengkalis, Indonesia

Email: [balqisamelia898@gmail.com](mailto:balqisamelia898@gmail.com)



DOI: <https://doi.org/10.34125/jmp.v11i3.2299>

### Sections Info

#### Article history:

Submitted: 11 April 2026

Final Revised: 23 April 2026

Accepted: 16 May 2026

Published: 20 June 2026

#### Keywords:

Administrative Ethics;  
Educational Governance;  
Accountable.



### ABSTRACT

Education is a strategic sector that plays a vital role in improving the quality of human resources and the progress of a nation. Achieving quality education requires accountable educational governance supported by the implementation of strong administrative ethics. This study aims to analyze the role of administrative ethics in building accountable educational governance and examine the relationship between administrative ethical values and improving the quality of educational institution management. This study uses a library research method by reviewing various literature sources such as books, scientific journals, and research results relevant to the topic of administrative ethics and educational governance. Data are analyzed descriptively and qualitatively to obtain a comprehensive understanding of the concept, role, and implementation of administrative ethics in education. The results of the study indicate that administrative ethics plays a role in increasing transparency, professionalism, responsibility, and public trust in educational institutions. Accountable educational governance is influenced by ethical leadership, a transparent administrative system, human resource competence, and clear regulations. Thus, the consistent application of administrative ethics can support the realization of quality, integrity, and sustainable education.

### ABSTRAK

Pendidikan merupakan sektor strategis yang berperan penting dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan kemajuan suatu bangsa. Dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas, diperlukan tata kelola pendidikan yang akuntabel yang didukung oleh penerapan etika administrasi yang kuat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi dalam membangun tata kelola pendidikan yang akuntabel serta mengkaji hubungan antara nilai-nilai etika administrasi dengan peningkatan kualitas pengelolaan lembaga pendidikan. Penelitian ini menggunakan metode studi kepustakaan (library research) dengan mengkaji berbagai sumber literatur seperti buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian yang relevan dengan topik etika administrasi dan tata kelola pendidikan. Data dianalisis secara deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai konsep, peran, serta implementasi etika administrasi dalam pendidikan. Hasil kajian menunjukkan bahwa etika administrasi berperan dalam meningkatkan transparansi, profesionalisme, tanggung jawab, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Tata kelola pendidikan yang akuntabel dipengaruhi oleh kepemimpinan yang etis, sistem administrasi yang transparan, kompetensi sumber daya manusia, serta regulasi yang jelas. Dengan demikian, penerapan etika administrasi secara konsisten dapat mendukung terwujudnya pendidikan yang berkualitas, berintegritas, dan berkelanjutan.

**Kata kunci:** Etika Administrasi, Tata Kelola Pendidikan, Akuntabel

## PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan sektor strategis yang memiliki peran fundamental dalam menentukan arah dan kualitas pembangunan suatu bangsa. Keberhasilan pembangunan pendidikan tidak hanya diukur dari capaian akademik peserta didik, tetapi juga dari efektivitas tata kelola lembaga pendidikan yang mampu menjamin transparansi, akuntabilitas, dan integritas dalam setiap proses penyelenggaraannya. Dalam konteks ini, tata kelola pendidikan yang baik (*good educational governance*) menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. (Rukmana et al., 2024).

Tata kelola pendidikan yang akuntabel menuntut adanya sistem administrasi yang tidak hanya efisien dan efektif, tetapi juga berlandaskan pada nilai-nilai etika. Etika administrasi berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan perilaku aparatur pendidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya. Tanpa adanya etika administrasi yang kuat, berbagai kebijakan dan program pendidikan berpotensi mengalami penyimpangan, baik dalam bentuk penyalahgunaan wewenang, ketidaktransparanan dalam pengelolaan anggaran, maupun rendahnya tanggung jawab terhadap publik. (Wandi et al., 2024).

Dalam praktiknya, penyelenggaraan administrasi pendidikan di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan yang kompleks. Beberapa permasalahan yang sering muncul antara lain lemahnya sistem pengawasan internal, kurangnya transparansi dalam pengelolaan keuangan pendidikan, serta rendahnya budaya integritas di kalangan aparatur pendidikan. Selain itu, fenomena birokrasi yang cenderung formalistik dan belum sepenuhnya berorientasi pada pelayanan publik juga menjadi kendala dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang ideal. (Putra & Roni, 2021).

Data Indonesia Corruption Watch (ICW) menunjukkan bahwa sektor pendidikan masih termasuk dalam kategori rentan terhadap penyalahgunaan anggaran, khususnya dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Selain itu, Ombudsman Republik Indonesia juga mencatat adanya berbagai laporan maladministrasi pendidikan seperti penyalahgunaan kewenangan, kurangnya transparansi pelayanan, serta lemahnya pengawasan internal di lembaga pendidikan. Kondisi ini menunjukkan bahwa penerapan etika administrasi dalam tata kelola pendidikan masih belum optimal sehingga diperlukan penguatan sistem administrasi yang berintegritas dan akuntabel. (Puja et al., 2026).

Etika administrasi pada hakikatnya merupakan seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi landasan dalam setiap tindakan administratif. Nilai-nilai tersebut mencakup kejujuran (*honesty*), tanggung jawab (*responsibility*), keadilan (*fairness*), transparansi (*transparency*), dan akuntabilitas (*accountability*). Dalam konteks pendidikan, penerapan etika administrasi tidak hanya berdampak pada peningkatan kualitas manajemen lembaga pendidikan, tetapi juga berkontribusi terhadap terciptanya kepercayaan publik (*public trust*). (Muadzin & Sunarto, 2025).

Seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan tuntutan globalisasi, tata kelola pendidikan mengalami transformasi yang signifikan. Digitalisasi administrasi pendidikan, seperti penggunaan sistem informasi manajemen sekolah dan pelaporan keuangan berbasis elektronik, memberikan peluang besar untuk meningkatkan transparansi dan efisiensi. Namun demikian, transformasi digital juga menghadirkan tantangan baru terkait dengan etika, seperti perlindungan data, keamanan informasi, serta potensi penyalahgunaan teknologi.

Lebih lanjut, konsep akuntabilitas dalam pendidikan tidak hanya terbatas pada pertanggungjawaban administratif dan finansial, tetapi juga mencakup aspek kinerja dan dampak dari kebijakan pendidikan. Akuntabilitas menuntut setiap lembaga pendidikan untuk mampu menjelaskan dan mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang diambil kepada pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan peserta didik.

Selain itu, kepemimpinan dalam lembaga pendidikan juga memiliki peran penting dalam menginternalisasikan nilai-nilai etika administrasi. Pemimpin yang memiliki integritas tinggi akan mampu menjadi teladan bagi seluruh anggota organisasi dalam menerapkan prinsip-prinsip etika dalam pekerjaan sehari-hari. Sebaliknya, lemahnya kepemimpinan etis dapat memperburuk praktik administrasi yang tidak akuntabel dan menurunkan kualitas tata kelola pendidikan secara keseluruhan. (Brown, M. E., & Treviño, 2021).

Berdasarkan uraian tersebut, dapat dipahami bahwa etika administrasi merupakan elemen kunci dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel. Namun demikian, masih diperlukan kajian yang lebih mendalam untuk memahami bagaimana etika administrasi dapat diimplementasikan secara efektif dalam konteks pendidikan, serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi keberhasilannya. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran etika administrasi dalam pendidikan, tata kelola pendidikan yang akuntabel, dan hubungan etika administrasi dengan tata kelola pendidikan yang akuntabel.

## **METODE PENELITIAN**

Jenis Penelitian yang digunakan ialah studi kepustakaan (Literatur Review), yaitu pendekatan ini tidak melibatkan pengumpulan data primer dari lapangan melainkan menelaah dan menganalisis berbagai jenis sumber informasi yang sudah ada. Literatur review berisi uraian tentang teori, temuan dan bahan penelitian lain yang diperoleh dari bahan acuan untuk dijadikan landasan kegiatan penelitian. (Hasibuan, 2007).

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui pengutipan dari berbagai sumber seperti buku, jurnal ilmiah, artikel, dan dokumen yang relevan dengan topik penelitian. Sementara itu, teknik analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan cara menguraikan dan menganalisis data yang diperoleh sehingga menghasilkan pembahasan yang sistematis mengenai etika administrasi dan tata kelola pendidikan yang akuntabel.

Proses studi kepustakaan (Literature Review) dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu mencari dan mengumpulkan berbagai sumber literatur yang relevan, menyeleksi sumber berdasarkan kesesuaian pembahasan, membaca dan memahami isi literatur, kemudian mencatat informasi penting dari setiap sumber. Selanjutnya, data dianalisis dan disusun secara sistematis untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif sesuai dengan tujuan penelitian.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Etika Administrasi Dalam Pendidikan**

Pengertian etika dalam bahasa latin adalah "Moralis" atau "Ethica". Istilah ini merujuk pada studi mengenai prinsip-prinsip moral dan perilaku yang baik yang mengarahkan tindakan manusia. Etika melibatkan pertimbangan tentang apa yang benar dan salah, baik dan buruk, serta bagaimana kita seharusnya bertindak dalam berbagai konteks kehidupan. Etika juga melibatkan refleksi tentang nilai-nilai, norma, dan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi tindakan dan keputusan yang diambil oleh individu dan masyarakat. (Suryani,

2024).

Berdasarkan penjelasan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia dikemukakan tiga arti dari kata etika sebagai berikut. Pertama, kata “etika” dipakai dalam arti, nilai-nilai dan norma-norma moral yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kedua, etika sebagai kumpulan asas atau nilai moral, yaitu sebagai kode etik. Ketiga, istilah “Etika” digunakan untuk menunjuk bidang ilmu, yaitu pengkajian secara reflektif tentang nilai-nilai moral dalam masyarakat dengan penelitian sistematis dan metodis. Dalam arti ini, maka etika adalah sebagai cabang filsafat yang menjadikan moralitas sebagai kajiannya atau disebut filsafat moral. Etika merupakan seperangkat nilai-nilai dan norma-norma moral baik tertulis maupun tidak tertulis yang digunakan sebagai pegangan bagi seorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. (Fafako P & Kurniasih, 2024).

Administrasi sendiri memiliki sebuah pengertian yakni suatu kegiatan yang dilakukan dengan cara bekerjasama untuk mencapai sebuah tujuan yang telah ditetapkan. Sedangkan pendidikan merupakan sebuah upaya intelektual serta spiritual guna mencerdaskan manusia sejak baik dalam lembaga pendidikan formal ataupun lembaga pendidikan nonformal yang dilaksanakan secara sistematis, metodologis, dan filosofis. Oleh sebab itu administrasi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan yang berkenaan dengan tujuan membenahi proses pendidikan guna pencapaian tujuan pendidikan. Akan tetapi perlu dipahami bahwa administrasi pendidikan bukanlah sebuah kegiatan pendidikan melainkan sebuah upaya pengendalian rangkaian kegiatan pendidikan guna terjadinya pendidikan yang efektif dan efisien dalam mencapai sebuah tujuan. (Marpaung, 2023). Etika administrasi pendidikan adalah persoalan tanggung jawab manajerial pembelajaran efektif di sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Etika administrasi pendidikan juga dapat dipahami sebagai seperangkat nilai, norma, dan prinsip moral yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan administrasi pendidikan agar seluruh proses pengelolaan pendidikan berjalan secara jujur, disiplin, adil, profesional, serta bertanggung jawab. (Mughtar et al., 2024).

Etika administrasi dalam Pendidikan Islam melibatkan pemahaman mendalam tentang tanggung jawab manusia sebagai khalifah di bumi, di mana pengelolaan lembaga pendidikan diarahkan untuk mendidik peserta didik agar mampu menjalani kehidupan yang seimbang sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan Islam tidak hanya berfokus pada kecerdasan intelektual, tetapi juga pada pembentukan karakter mulia, keimanan, dan ketaqwaan, sehingga menciptakan manusia yang mampu memanfaatkan potensi mereka secara optimal untuk kebaikan bersama.

Dengan demikian, etika administrasi dalam perspektif Pendidikan Islam adalah sebuah kerangka kerja yang mencakup pengelolaan yang bijaksana dan berlandaskan nilai-nilai moral Islam, di mana tujuan akhirnya adalah menciptakan kesejahteraan spiritual dan material bagi peserta didik, lembaga pendidikan serta masyarakat luas. Prinsip-prinsip ini memastikan bahwa proses administrasi tidak hanya efisien, tetapi juga berorientasi pada pembentukan pribadi yang berakhlak mulia dan bertanggung jawab sebagai khalifah dimuka bumi. (Pamungkas, 2025).

Etika administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam menjamin terlaksananya proses pendidikan yang berkualitas, terarah, dan berintegritas. Peran ini tidak hanya berkaitan dengan aturan formal, tetapi juga menyangkut nilai moral yang menjadi dasar dalam setiap tindakan administrasi di lingkungan pendidikan. Terdapat beberapa peran etika administrasi Pendidikan:

1. Mewujudkan Tata Kelola Pendidikan yang Baik

Etika administrasi berperan dalam menciptakan sistem pengelolaan pendidikan yang

transparan, akuntabel, efektif, dan efisien. Dalam praktiknya, setiap kebijakan yang dibuat oleh kepala sekolah atau pengelola pendidikan harus didasarkan pada prinsip kejujuran dan keterbukaan. Dengan demikian, seluruh kegiatan administrasi dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan pihak terkait. Selain itu, penerapan etika administrasi juga mendorong adanya partisipasi dari berbagai pihak seperti guru, orang tua, dan masyarakat dalam pengambilan keputusan, sehingga tercipta sistem pendidikan yang demokratis.

## 2. Meningkatkan Profesionalisme Tenaga Kependidikan

Etika administrasi menjadi pedoman bagi tenaga kependidikan dalam menjalankan tugasnya secara profesional. Profesionalisme tercermin dari sikap disiplin, tanggung jawab, komitmen terhadap tugas, serta kemampuan dalam menjalankan fungsi administrasi secara efektif.

Dengan adanya etika administrasi, tenaga kependidikan tidak hanya bekerja berdasarkan aturan, tetapi juga berdasarkan kesadaran moral untuk memberikan pelayanan terbaik kepada peserta didik. Hal ini akan berdampak pada peningkatan kualitas pembelajaran di sekolah. (Afrina Welni et al., 2024).

## 3. Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat Terhadap Lembaga Pendidikan

Lembaga pendidikan yang menerapkan etika administrasi dengan baik akan memperoleh kepercayaan dari masyarakat. Kepercayaan ini sangat penting karena masyarakat merupakan salah satu pihak yang berperan dalam mendukung keberhasilan pendidikan. Transparansi dalam pengelolaan keuangan, keadilan dalam pelayanan, serta kejujuran dalam penyampaian informasi menjadi faktor utama yang mempengaruhi tingkat kepercayaan masyarakat terhadap sekolah.

## 4. Membentuk Karakter dan Keteladanan dalam Lingkungan Pendidikan

Etika administrasi tidak hanya berdampak pada sistem pengelolaan, tetapi juga berperan dalam membentuk karakter warga sekolah. Kepala sekolah dan guru yang menerapkan etika yang baik akan menjadi teladan bagi peserta didik. Keteladanan ini sangat penting dalam proses pendidikan, karena peserta didik tidak hanya belajar dari materi pelajaran, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang ditunjukkan oleh tenaga kependidikan. (Wandi et al., 2024).

## Tata Kelola Pendidikan Yang Akuntabel

Tata kelola merupakan suatu bagian yang penting dalam pendidikan, tata kelola pendidikan tersebut memiliki hubungan yang sangat erat dengan administrasi di karenakan proses pendidikan dan tata kelola di suatu sekolah bergantung pada pengadministrasiannya. (Tasdin Tahrim, Alimuddin, Ikmal, 2024). Tata kelola pendidikan merupakan pemanfaatan sumber daya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan peningkatan kualitas pendidikan yang ada. Penentuan dimensi tata kelola utama yang mendasari penyampaian layanan pendidikan yang efektif dapat menjadi titik awal untuk mengatasi kelemahan yang ada dan meningkatkan kinerja pendidikan. Dalam tata kelola lembaga, seperti lembaga pendidikan memerlukan keahlian khusus untuk mengatur semua pihak yang terlibat di dalamnya. Tata kelola pendidikan dapat dipahami sebagai suatu proses terstruktur dan sistematis yang dijalankan oleh pihak atau lembaga yang memiliki kewenangan dalam mengatur, mengelola, dan mengawasi penyelenggaraan pendidikan. (Prabowo et al., 2025).

Secara umum, para ahli sepakat bahwa tata kelola pendidikan adalah suatu sistem yang mengelola berbagai aspek dalam pendidikan, baik itu kebijakan, pengelolaan sumber daya, kurikulum, pengawasan, hingga evaluasi yang melibatkan berbagai pihak, mulai dari pemerintah, lembaga pendidikan, guru, siswa, dan masyarakat. Tujuan dari tata

kelola pendidikan adalah untuk meningkatkan kualitas pendidikan, memastikan proses pendidikan berjalan dengan baik, serta mencapai tujuan pendidikan yang optimal. Dalam pelaksanaannya, tata kelola pendidikan terus mengalami perkembangan seiring dengan perubahan kebutuhan dan tuntutan organisasi pendidikan. (Rawis et al., 2025). Oleh karena itu, Perubahan tata kelola saling terkait dengan perubahan organisasi yang bergantung pada faktor-faktor seperti peningkatan profesionalisasi. (Macheridis & Paulsson, 2021).

Pengelolaan pendidikan yang akuntabel dan profesional, merupakan hal wajib dan harus ditempuh apabila menginginkan terjadi proses pendidikan yang maksimal dengan hasil yang optimal melalui mekanisme organisasi yang baku. (Rawis et al., 2025). Tata kelola pendidikan yang akuntabel adalah proses pengelolaan pendidikan yang dilakukan secara terencana, transparan, efektif, dan bertanggung jawab, sehingga setiap kebijakan, program, dan penggunaan sumber daya pendidikan dapat dipertanggungjawabkan secara moral, administratif, dan hukum.

Tujuan tata kelola pendidikan yang akuntabel adalah untuk memastikan bahwa pengelolaan pendidikan dilaksanakan secara bertanggung jawab, transparan, dan sesuai dengan nilai-nilai etika profesi pendidik dan tenaga kependidikan. Melalui tata kelola yang akuntabel, setiap kegiatan pendidikan, baik yang berkaitan dengan proses pembelajaran, pengelolaan sumber daya, maupun pengambilan keputusan, dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan seperti peserta didik, orang tua, masyarakat, dan pemerintah. Hal ini juga bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan serta menumbuhkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Sebagaimana yang di jelaskan di dalam al-qur'an surah **Al-Baqarah Ayat 286**:

لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۗ مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ ۗ عَلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِنَا ۗ رَبَّنَا وَلَا تُحْمِلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۗ وَاعْفُ عَنَّا وَاعْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۗ أَنْتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ۝ (٢٨٦)

Artinya: "Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Dia mendapat (pahala) dari kebajikan yang dikerjakannya dan dia mendapat (siksa) dari (kejahatan) yang diperbuatnya. (Mereka berdoa), "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau hukum kami jika kami lupa atau kami melakukan kesalahan. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau bebani kami dengan beban yang berat sebagaimana Engkau bebani kepada orang-orang sebelum kami. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tidak sanggup kami memikulnya. Maafkanlah kami, ampunilah kami, dan rahmatilah kami. Engkaulah pelindung kami, maka tolonglah kami menghadapi orang-orang kafir."

Dalam penafsiran Ibnu Katsir, ayat ini menunjukkan bahwa syariat Islam dibangun di atas prinsip kemudahan dan keadilan, sehingga tidak ada ketentuan yang bersifat memberatkan secara tidak wajar. Setiap individu diberikan ruang untuk menjalankan kewajibannya sesuai kapasitasnya, dan pada saat yang sama, ia akan menerima balasan atas setiap amal yang dilakukan. Penjelasan Al-Qurtubi juga menekankan bahwa ayat ini mengandung prinsip pertanggungjawaban pribadi yang tidak dapat dialihkan kepada pihak lain, sehingga membentuk kesadaran moral yang kuat dalam diri manusia.

Lebih jauh, ayat ini memuat rangkaian doa yang mencerminkan hubungan spiritual antara manusia dan Tuhannya. Doa tersebut menggambarkan sikap rendah hati manusia yang mengakui kemungkinan berbuat salah, baik karena kelalaian maupun ketidaksengajaan, serta memohon agar tidak dibebani dengan tanggung jawab yang melampaui batas kemampuannya. Dalam perspektif tafsir, bagian ini menegaskan pentingnya sikap introspeksi dan harapan akan ampunan serta rahmat Allah. Hal ini

menunjukkan bahwa kehidupan manusia tidak lepas dari proses evaluasi diri yang terus-menerus, sehingga kesalahan tidak menjadi akhir, melainkan bagian dari proses menuju perbaikan.

Dalam konteks tata kelola pendidikan yang akuntabel, ayat ini dapat dijadikan sebagai landasan normatif dalam membangun sistem yang adil dan bertanggung jawab. Prinsip kesesuaian antara beban dan kemampuan mengisyaratkan pentingnya distribusi tugas yang proporsional dalam lembaga pendidikan, sehingga tidak terjadi ketimpangan dalam pelaksanaan tanggung jawab. Sementara itu, konsep balasan atas setiap perbuatan mencerminkan esensi akuntabilitas, dimana setiap pelaku Pendidikan harus mempertanggungjawabkan kinerjanya secara transparan. Adapun nilai doa dalam ayat tersebut mengandung pesan bahwa tata kelola yang baik juga harus memberikan ruang evaluasi dan perbaikan yang berkelanjutan, sehingga pendidikan tidak hanya dikelola secara administratif, tetapi juga berorientasi pada nilai-nilai etis dan kemanusiaan.

Tata kelola pendidikan yang akuntabel terdiri dari beberapa komponen yang bekerja secara interdependen, untuk menciptakan sistem pendidikan yang baik dan berkualitas. Berikut adalah komponen-komponen utama dalam tata kelola Pendidikan:

#### 1) Kebijakan Pendidikan

Kebijakan pendidikan (educational policy) sebagai suatu pertimbangan yang didasarkan atas sistem nilai dan beberapa penilaian atas faktor-faktor yang bersifat situasional, pertimbangan tersebut dijadikan sebagai dasar untuk mengopersikan pendidikan yang bersifat melembaga. Pertimbangan tersebut merupakan perencanaan yang dijadikan sebagai pedoman untuk mengambil keputusan, agar tujuan yang bersifat melembaga bisa tercapai. Kebijakan pendidikan sangat erat hubungannya dengan kebijakan yang ada dalam lingkup kebijakan publik, misalnya kebijakan ekonomi, politik, luar negeri, keagamaan dan lain-lain.

#### 2) Struktur Organisasi Dan Manajemen

Struktur organisasi pendidikan adalah struktur yang mendasari keputusan para Pembina atau Pendiri sekolah untuk mengawali suatu proses perencanaan sekolah yang strategis. Organisasi pendidikan juga dapat dikatakan sebagai seperangkat hukum yang mengatur formasi dan administrasi atau tata laksana organisasi-organisasi pendidikan di Indonesia. Manajemen pendidikan adalah serangkaian proses yang melibatkan perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan sumber daya pendidikan untuk mencapai tujuan pendidikan secara efektif dan efisien. Ini mencakup berbagai aktivitas yang dilakukan oleh kepala sekolah, administrator, dan staf pendidikan lainnya untuk memastikan bahwa proses pendidikan berjalan dengan lancar dan hasil yang diinginkan tercapai.

#### 3) Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan salah satu komponen utama dalam organisasi, yang sangat menentukan kesuksesan suatu entitas, baik itu di sektor bisnis, pemerintahan, maupun pendidikan. SDM, dalam hal ini, tidak hanya dilihat sebagai tenaga kerja semata, tetapi sebagai aset yang memiliki nilai strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pendidikan secara keseluruhan. Dalam konteks ini, pengelolaan SDM berperan penting dalam pengembangan potensi individu yang ada dalam pendidikan untuk mencapai tujuan jangka panjang.

#### 4) Pengelolaan Keuangan

Keuangan itu sendiri ialah komponen atau bagian penting dalam lembaga pendidikan, maka dari itu diperlukan adanya kebutuhan terdapatnya pengelolaan keuangan yang baik supaya proses pendidikan bisa berjalan cocok dengan tujuannya. Dalam

pengelolaan keuangan pendidikan, perhatian besar diberikan pada pentingnya pengelolaan keuangan pendidikan yang diatur dalam kenaikan program sekolah, penerapan guru dalam aktivitas pembelajaran dan pendidikan, dan penerapan keberhasilan partisipasi akademik siswa. Fasilitas serta prasarana pelatihan harus dikelola dengan baik dan menunjang sehingga fasilitas ini merupakan bagian integral dari manajemen pelatihan. Tanpa infrastruktur pendidikan, menjadikan pembelajaran menjadi lebih sulit serta mempengaruhi hasil belajar siswa.

#### 5) Pengawasan Dan Evaluasi

Pengawasan menuntut kepada para manajer untuk menggunakan kewenangan mereka dalam rangka menjamin bahwa tindakan pekerja sesuai dengan tujuan dan aturan organisasi. Di bidang pendidikan, pengawas merupakan individu atau personil pendidikan yang bertugas untuk menguji, memeriksa, memverifikasi, dan memeriksa ulang segala aktivitas kependidikan dengan segala fasilitas penunjangnya. Evaluasi merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang evaluator terhadap suatu peristiwa atau kejadian. Tindakan ini mengandung maksud untuk memberikan arti atau makna dari kejadian itu sehingga dapat diproses lebih lanjut. Evaluasi pendidikan adalah pemberian estimasi (Penilaian) terhadap pelaksanaan pendidikan untuk menentukan keefektifan dan kemajuan dalam rangka mencapai tujuan pendidikan yang telah ditetapkan.

#### 6) Partisipasi Stakeholder

Stakeholder mengacu pada siapa pun yang memiliki kepentingan dalam suatu usaha yang mampu mempengaruhi atau dipengaruhi dalam pencapaian tujuan tertentu. Stakeholder pendidikan adalah semua pihak yang memiliki kepentingan dalam proses pendidikan dan yang dapat memengaruhi atau dipengaruhi oleh keputusan, kebijakan, serta hasil yang dicapai dalam dunia pendidikan, seperti siswa, guru, orang tua, kepala sekolah. (Simanjuntak et al., 2023).

Terdapat beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi tata kelola pendidikan yang akuntabel:

1. Kepemimpinan Yang Etis Dan Profesional. Pemimpin lembaga pendidikan, seperti kepala sekolah atau pimpinan institusi, memiliki peran strategis dalam menentukan arah kebijakan, budaya organisasi, serta penerapan nilai-nilai transparansi dan tanggung jawab. Kepemimpinan yang berintegritas akan mendorong terciptanya sistem pengelolaan yang jujur, terbuka, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga setiap kebijakan yang diambil dapat dipertanggungjawabkan secara moral maupun administratif.
2. Sistem Administrasi Dan Manajemen Yang Transparan. Transparansi dalam pengelolaan anggaran, pelaporan keuangan, serta pelaksanaan program pendidikan memungkinkan adanya pengawasan dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Dengan adanya sistem yang jelas dan terbuka, potensi penyimpangan dapat diminimalisir, dan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan akan meningkat.
3. Kompetensi Sumber Daya Manusia. Tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki kompetensi profesional, pemahaman etika, serta kemampuan administratif yang baik akan mampu menjalankan tugasnya secara efektif dan bertanggung jawab. SDM yang berkualitas akan memastikan bahwa setiap proses pendidikan berjalan sesuai standar dan dapat dipertanggungjawabkan hasilnya.
4. Regulasi dan kebijakan pendidikan yang jelas. Aturan yang tegas, konsisten, dan mudah dipahami akan memberikan pedoman bagi seluruh pelaku pendidikan dalam

menjalankan tugasnya. Dengan adanya regulasi yang kuat, setiap tindakan dalam pengelolaan pendidikan memiliki dasar hukum yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.

### **Hubungan Etika Administrasi Dengan Tata Kelola Pendidikan Yang Akuntabel**

Hubungan antara etika administrasi dengan tata kelola pendidikan yang akuntabel merupakan suatu keterkaitan yang bersifat fundamental dan tidak dapat dipisahkan dalam penyelenggaraan pendidikan modern. Etika administrasi berfungsi sebagai landasan nilai yang mengarahkan perilaku aparatur pendidikan dalam menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, sedangkan tata kelola pendidikan yang akuntabel merupakan wujud konkret dari implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik manajerial. Dalam konteks ini, etika administrasi tidak hanya dipahami sebagai seperangkat norma moral yang abstrak, melainkan sebagai pedoman operasional yang harus tercermin dalam setiap proses pengambilan keputusan, pengelolaan sumber daya, serta pelayanan kepada peserta didik dan masyarakat. Nilai-nilai seperti kejujuran, integritas, tanggung jawab, transparansi, dan keadilan menjadi prinsip utama yang membentuk karakter administrasi pendidikan yang profesional dan berorientasi pada kepentingan publik. (hanifah tri indah, 2025).

Etika administrasi memiliki peran strategis dalam membangun sistem tata kelola pendidikan yang akuntabel. Akuntabilitas dalam pendidikan menuntut adanya kemampuan lembaga untuk mempertanggungjawabkan setiap kebijakan, program, dan penggunaan anggaran kepada para pemangku kepentingan, termasuk pemerintah, masyarakat, dan orang tua peserta didik. Tanpa adanya landasan etika yang kuat, akuntabilitas hanya akan menjadi formalitas administratif yang tidak memiliki makna substantif. Oleh karena itu, etika administrasi menjadi faktor penentu dalam memastikan bahwa setiap laporan, kebijakan, dan tindakan yang dilakukan oleh lembaga pendidikan benar-benar mencerminkan kondisi yang sebenarnya dan dapat dipercaya.

Tata kelola pendidikan yang akuntabel juga merupakan manifestasi nyata dari keberhasilan internalisasi etika administrasi dalam organisasi pendidikan. Akuntabel tidak hanya berkaitan dengan pelaporan keuangan, tetapi juga mencakup aspek kinerja, proses, dan hasil pendidikan. Lembaga pendidikan yang menerapkan prinsip akuntabel akan berupaya menyajikan informasi yang terbuka, memberikan pelayanan yang berkualitas, serta bersedia menerima evaluasi dan kritik dari masyarakat. Dengan demikian, akuntabel dapat dipahami sebagai indikator sejauh mana nilai-nilai etika telah diimplementasikan dalam praktik administrasi pendidikan.

Hubungan antara etika administrasi dan tata kelola pendidikan yang akuntabel juga bersifat simbiotik, artinya keduanya saling membutuhkan dan saling melengkapi. Etika tanpa tata kelola yang baik akan berhenti pada tataran idealisme tanpa implementasi nyata, sementara tata kelola tanpa etika berpotensi melahirkan praktik-praktik penyimpangan seperti manipulasi data, penyalahgunaan anggaran, dan ketidakadilan dalam pelayanan pendidikan. Oleh karena itu, integrasi antara etika dan tata kelola menjadi suatu keharusan dalam menciptakan sistem pendidikan yang berkualitas dan berkelanjutan. Dalam praktiknya, integrasi ini dapat dilakukan melalui penguatan budaya organisasi yang menjunjung tinggi nilai-nilai etika, penerapan sistem pengawasan yang efektif, serta peningkatan kompetensi sumber daya manusia di bidang administrasi pendidikan. (Shelty D. Sumual & Dkk, 2024).

Selain itu, penerapan etika administrasi yang konsisten akan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepercayaan publik terhadap lembaga pendidikan. Kepercayaan ini merupakan modal sosial yang sangat penting dalam mendukung

keberhasilan program-program pendidikan. Ketika masyarakat melihat bahwa lembaga pendidikan dikelola secara jujur, transparan, dan bertanggung jawab, maka tingkat partisipasi dan dukungan masyarakat akan meningkat. Sebaliknya, rendahnya etika dalam administrasi pendidikan akan berdampak pada menurunnya akuntabilitas dan kepercayaan publik, yang pada akhirnya dapat menghambat pencapaian tujuan pendidikan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi dan tata kelola pendidikan yang akuntabel merupakan dua aspek yang saling berkaitan erat dan tidak dapat dipisahkan. Etika administrasi menjadi fondasi moral yang mengarahkan perilaku organisasi, sedangkan akuntabilitas menjadi indikator keberhasilan implementasi nilai-nilai tersebut dalam praktik nyata. Untuk mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel, diperlukan komitmen yang kuat dari seluruh pihak dalam menanamkan dan menerapkan nilai-nilai etika dalam setiap aspek pengelolaan pendidikan. Integrasi yang harmonis antara etika dan tata kelola tidak hanya akan meningkatkan kualitas administrasi pendidikan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik serta mendukung tercapainya tujuan pendidikan yang berkelanjutan dan berkeadilan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan yang telah diuraikan, dapat disimpulkan bahwa etika administrasi memiliki peran yang sangat penting dalam mewujudkan tata kelola pendidikan yang akuntabel. Etika administrasi menjadi landasan moral yang mengarahkan setiap tindakan, kebijakan, dan proses pengelolaan pendidikan agar berjalan secara jujur, transparan, bertanggung jawab, dan berkeadilan. Penerapan nilai-nilai etika seperti integritas, profesionalisme, tanggung jawab, dan transparansi tidak hanya mendukung efektivitas administrasi pendidikan, tetapi juga meningkatkan kualitas layanan pendidikan secara keseluruhan. Tata kelola pendidikan yang akuntabel tidak hanya berkaitan dengan pertanggungjawaban administratif dan keuangan, tetapi juga mencakup pertanggungjawaban kinerja, proses, dan hasil pendidikan kepada seluruh pemangku kepentingan.

Implikasi penelitian ini menunjukkan bahwa diperlukan sistem manajemen yang baik, kepemimpinan yang etis, sumber daya manusia yang kompeten, serta regulasi yang jelas agar prinsip akuntabilitas dapat diterapkan secara optimal dalam lembaga pendidikan. Hubungan antara etika administrasi dan tata kelola pendidikan yang akuntabel juga bersifat saling melengkapi sehingga mampu mendorong terciptanya budaya organisasi yang berintegritas dan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pendidikan. Penelitian ini masih terbatas pada kajian literatur sehingga penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengembangkan penelitian lapangan mengenai implementasi etika administrasi dalam tata kelola pendidikan secara lebih mendalam dan komprehensif. Selain itu, pengawasan yang berkelanjutan diperlukan untuk menjaga konsistensi penerapan nilai etika administrasi pendidikan nasional.

## REFERENSI

- Afrina Welni, Miken Wulandari, Yunita Yunita, Randy Wilyan Putra, Yulia Hanoselina, & Rahmadhona Fitri Helmi. (2024). Meningkatkan Profesionalisme Pelayanan Publik melalui Penerapan Etika Administrasi di Dinas Sosial Provinsi Sumatera Barat. *Jembatan Hukum: Kajian ilmu Hukum, Sosial dan Administrasi Negara*, 1(4), 154–166. <https://doi.org/10.62383/jembatan.v1i4.1157>
- Brown, M. E., & Treviño, L. K. (2021). Ethical Leadership. *The Leadership Quarterly*, 17(6), 595–600.

- Fafako P, P. G., & Kurniasih, D. (2024). Etika Administrasi Publik dalam Mewujudkan Good Governance di Indonesia. *INNOVATIVE: Journal of Social Science Research*, 4(1), 2810.
- hanifah tri indah, D. (2025). PERAN ETIKA ADMINISTRASI PUBLIK DI INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN GOOD GOVERNANCE DAN PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN. *Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial*, 7(6), 2025.
- Hasibuan, Z. A. (2007). Metodologi Penelitian Pada Bidang Ilmu Komputer Dan Teknologi Informasi. In *Konsep, Teknik, Dan Aplikasi* (Nomor Universitas Indonesia).
- Macheridis, N., & Paulsson, A. (2021). Tracing accountability in higher education. *Research in Education*, 110(1), 78–97. <https://doi.org/10.1177/0034523721993143>
- Marpaung, S. N. (2023). Administrasi Pendidikan. *Jurnal Pendidikan Social Dan Humaniora*, 2(1), 102.
- Muadzin, L. A., & Sunarto, S. (2025). Kepemimpinan Etis dan Kultural dalam Pendidikan Universitas Muhammadiyah Malang , Indonesia berlandaskan prinsip etika yang kuat . Dalam proses pengambilan keputusan , pemimpin etis. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, (2), 168–169.
- Muchtar, H. S., Handayani, S., Royani, I., Supriatna, S., & Sukaenah, S. (2024). Penerapan Etika Administrasi Siswa Berbudaya Positif Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di SD Negeri Panorama Kecamatan Cidaun Kabupaten Cianjur. *Jurnal Visionary: Penelitian dan Pengembangan dibidang Administrasi Pendidikan*, 12(1), 153. <https://doi.org/10.33394/vis.v12i1.10607>
- Pamungkas, P. (2025). Etika Administrasi dalam Membangun Integritas Publik. *Civic Education Perspective Journal*, 5(1), 42–52. <https://doi.org/10.22437/cepj.v5i1.41723>
- Prabowo, M. A., Fadjerini, L. N., Hidayadi, T., Zuhdi, M., Ulfah, F., Razik, M. A., & Hanifah, M. N. (2025). Supervision of Ethical Compliance and Government Integrity in Improving Accountability and Transparency of Educational Governance. *Mandalika Journal of Business and Management Studies*, 3(1), 1–5. <https://doi.org/10.59613/mjbms.v3i1.180>
- Puja, D., Ditia, T., Pebriora, I. D., Delin, N. P., & Widyawati, S. (2026). Pelanggaran Yang Terjadi Pada Penyalahgunaan Dana Boss Sekolah. *Jurnal Penelitian Nusantara*, 2(2), 64–68. <https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.705>
- Putra, A. I. P., & Roni, M. (2021). Good Governance Dalam Lingkungan Pendidikan Tinggi. *Al-Idarah: Jurnal Kependidikan Islam*, 11, 227–236.
- Rawis, J. A. M., Sumual, S. D. M., Munir, S., Universitas, P., & Manado, N. (2025). meni. *Jurnal Ilmiah Multidisipliner (JIM)*, 9(6), 10–12.
- Rukmana, N. S., Majid, A. F., Bahri, S., & Hanafi, N. K. (2024). Governance Transformation: Analysis of the Effectiveness of Good University Governance in Higher Education. *Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Publik*, 14(2), 541. <https://doi.org/10.26858/jiap.v14i2.67026>
- Shelty D. Sumual, & Dkk. (2024). MENINJAU STRATEGI KEPENGAWASAN DALAM MENINGKATKAN AKUNTABILITAS DAN TRANSPARANSI TATA KELOLA PENDIDIKAN Shelty. *Jurnal Ilmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri*, 10(2), 10. <https://journal.stkipsubang.ac.id/index.php/didaktik/article/view/290>
- Simanjuntak, R., Elfrianto, Yusmidani, & Saragih, V. (2023). Administrasi Tata Kelola Pendidikan Dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan. *Aptana: Jurnal Ilmu & humaniora*, 5(1), 16.
- Suryani, R. A. (2024). Pegawai Negeri Sipil ( Pns ) Di Kantor Camat Kecamatan. *Journal JIADS*, 19(2), 146.
- Tasdin Tahrim, Alimuddin, Ikmal, S. (2024). Tata Kelola Administrasi Pendidikan Madrasah Tsanawiyah. *Journal of Islamic Education Management*, 9(1), 171–178.

<https://doi.org/https://doi.org/10.59435/menulis.v2i1.705>

Wandi, Mardiaty, L., Akma Khairun Nisa, Ahmad Sabri, & Yusran Lubis. (2024). Evaluasi dan Akuntabilitas dalam Manajemen Pendidikan: Strategi untuk Meningkatkan Kualitas Pembelajaran. *Jurnal Manajemen dan Pendidikan Agama Islam*, 3(1), 42-51. <https://doi.org/10.61132/jmpai.v3i1.820>

---

---

**Copyright holder:**

© Author

**First publication right:**

Jurnal Manajemen Pendidikan

**This article is licensed under:**

**CC-BY-SA**